

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang adil dan merata, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya, pemerintah harus membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian, seperti jalan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang telah dibangun ini tentunya perlu dipelihara agar mempunyai umur ekonomis yang lama, dan untuk memelihara tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber pendanaan yang dimiliki pemerintah adalah melalui pajak yang dipungut dari wajib pajak. Pemerintah membutuhkan penerimaan perpajakan untuk membiayai dan setiap tahun target penerimaan perpajakan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari pos penerimaan dan pos pengeluaran. Pos penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena tidak mungkin selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Awalnya sektor migas menjadi andalan penerimaan dalam negeri, namun karena harga migas, khususnya minyak yang senantiasa berfluktuasi menyulitkan pemerintah dalam membuat asumsi pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara.

Sebagai sumber penerimaan utama negara, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap penerimaan pajak, yang dilakukan melalui reformasi perpajakan, mencakup reformasi kebijakan dan administrasi. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui modernisasi administrasi perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan antara lain meliputi perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dapat memonitor proses pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas.

Pelayanan yang cepat dan transparan bertujuan agar para wajib pajak tidak malas lagi untuk membayar pajaknya, namun adanya perbedaan terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan menurut perpajakan (fiskal) membuat perlu adanya perubahan pada laporan keuangan yang telah disusun oleh Wajib Pajak.

Dalam rangka memperbaiki laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan perpajakan, maka fiskus akan melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bisa meningkatkan laba perusahaan sehingga meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar, atau justru sebaliknya, mengurangi laba sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan hal ini maka dilakukan penelitian dengan tema **“Peranan Koreksi Fiskal Dalam Meminimalkan Beban Pajak Badan”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi adalah

1. Bagaimana koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan
2. Apakah beban perusahaan berbeda secara signifikan sebelum dan setelah perusahaan melakukan koreksi fiskal

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan
2. Perbedaan beban perusahaan sebelum dan setelah perusahaan melakukan koreksi fiskal

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk

1. Pengembangan ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai koreksi fiskal dan hubungannya dengan beban, dengan menerapkan teori-teori selama di bangku kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi serta melatih kemampuan analisis dan berpikir sistematis.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan dalam kaitannya dengan koreksi fiskal dan beban perusahaan.

## **1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Definisi pajak menurut Menurut Abut (2005:1)

“Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang pengenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.”

Menurut Abut (2005:3) pajak dapat digolongkan berdasarkan tiga kriteria, berdasarkan organisasi pengelolanya, berdasarkan golongannya, dan berdasarkan sifatnya. Salah satu jenis pajak berdasarkan organisasi pengelolanya adalah Pajak Pusat. Pajak pusat adalah pajak yang penggolongannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (negara). Salah satu Pajak Pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut kepada Wajib Pajak, baik badan maupun perseorangan yang memiliki penghasilan sejumlah tertentu, jadi jika Wajib Pajak tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya dibawah nominal tertentu, maka Wajib Pajak tersebut tidak diwajibkan membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak harus membuat laporan keuangan atau laporan penghasilan yang akan diperiksa oleh Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Laporan keuangan komersial yang dibuat Wajib pajak ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berterima umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak).

Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu (Bambang Kesit):

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstra komtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstra komtabel) melalui penyesuaian atau proses koreksi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.

Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi; perbedaan metode dan prosedur akuntansi; perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya; perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Oleh karena itu adanya koreksi terhadap laporan keuangan komersial akan menyebabkan perbedaan terhadap jumlah laba, yang berarti terdapat perbedaan pada jumlah pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Terdapat perbedaan beban yang signifikan sebelum dan setelah dilakukan koreksi fiskal.”**

## **1.6 Metode Penelitian**

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif. Menurut Sugiono (2005:11) “penelitian deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.” Menurut Arikunto (2002:7) bahwa, “penelitian verifikatif pada dasarnya menguji kebenaran pengumpulan data di lapangan.”

Penelitian ini juga menggunakan metode-metode survei. Metode survei menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2005:7) adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Dalam penelitian ini, perhitungan statistik yang digunakan adalah uji beda dua sampel berpasangan (*paired sample t-test*), yaitu beban-beban perusahaan sebelum koreksi fiskal dan beban-beban perusahaan setelah koreksi fiskal

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dari catatan pihak lain. Data yang diperoleh secara tidak langsung, didapat dari arsip atau data perusahaan, buku-buku serta literatur perusahaan, artikel serta tulisan ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas, yang dalam hal ini adalah data mengenai besarnya beban yang ada dalam laporan keuangan..

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka dilakukan analisis sehingga data tersebut lebih berarti. Teknik perhitungan dan analisis data yang digunakan

untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah dengan uji beda uji t, dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{X}_{before} - \bar{X}_{after}}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{before}}{n_1} + \frac{\sigma^2_{after}}{n_2}}}$$

dimana:

t = nilai hitung

$\bar{X}_{after}$  = beban-beban perusahaan setelah koreksi fiskal

$\bar{X}_{before}$  = beban-beban perusahaan sebelum koreksi fiskal

$\sigma^2_{after}$  = varians sampel yang berasal dari populasi sesudah koreksi fiskal

$\sigma^2_{before}$  = varians sampel yang berasal dari populasi sebelum koreksi fiskal

$n_{1,2}$  = ukuran sample

Pengujian hipotesis penelitian :

$$H_0 : \bar{X}_{after} - \bar{X}_{before} = 0$$

Tidak terdapat perbedaan beban yang signifikan sebelum dan setelah adanya koreksi fiskal

$$H_1 : \bar{X}_{after} - \bar{X}_{before} \neq 0$$

Terdapat perbedaan beban yang signifikan sebelum dan setelah adanya koreksi fiskal



### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. X, yang berada di Kota Bandung.

Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober dan akan berlangsung hingga selesai.